

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

**Dinamika Kebijakan Presiden Korea Selatan
Park Geun Hye Mengenai Reunifikasi
Tahun 2013-2016**



Zusliha Zulkarni

20140510253



Yang Disetujui

Prof. Dr. Tulus Warsito, M. Si.

Dosen Pembimbing

REUNIFIKASI KOREA DALAM PERSPEKTIF KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA

Oleh:

Zusliha Zulkarni

ABSTRAK. Korea Selatan dan Korea Utara adalah dua negara yang pada mulanya bersatu, tetapi akhirnya terpecah menjadi dua Korea yang sangat berlawanan. Konflik berkepanjangan sejak perang Korea di tahun 1950 membuat kedua pemimpin Korea berpikir untuk segera menyelesaikannya dan ingin menyatukan Korea kembali dalam kesepakatan damai. Namun, proses reunifikasi bertemu banyak kesulitan karena ketegangan yang berlangsung di antara keduanya dan membuat prospek reunifikasi tidak segera terwujud. Oleh karena itu, para pemimpin Korea Selatan terus berusaha mengedepankan reunifikasi sebagai prioritas kebijakan, tidak terkecuali pada masa pemerintahan Park Geun Hye.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis perspektif Korea Selatan dan Korea Utara serta kebijakan yang dibuat oleh Park Geun Hye dalam mewujudkan kesepakatan reunifikasi, terutama menyoroti perubahan implementasi kebijakan reunifikasinya yang tidak sesuai dengan kebijakan pada awalnya. Saya menduga bahwa terdapat banyak faktor baik internal maupun eksternal yang terjadi di tengah pemerintahan dan memberikan pengaruh pada kebijakan Park Geun Hye, sehingga implementasi kebijakannya juga berbeda.

Kata Kunci: *Dua Korea, Kebijakan Luar Negeri, Reunifikasi*

I. PENDAHULUAN

Korea merupakan negara yang bersatu di bawah pemerintahan tunggal selama hampir 1300 tahun. Kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua di tahun 1945 membuat Korea Selatan diduduki oleh pasukan Amerika Serikat dan Korea Utara diduduki oleh Uni Soviet. Amerika membangun negara demokratis yang disebut sebagai *Republik of Korea* (ROK) atau Korea Selatan itu sendiri pada tanggal 15 Agustus 1948, sedangkan Soviet membantu membangun negara komunis yang disebut *Democratic People Republic of Korea* (DPRK) atau Korea Utara pada tanggal 9 September 1948.

Dua rezim yang terbentuk di satu semenanjung tersebut mewakili adanya konflik ideologi yang sangat bertentangan. Pemisahan semenanjung membuat persaingan terus berlangsung lama dan menimbulkan pemborosan biaya maupun kekuatan nasional.

Mengingat terpisahnya Korea Selatan dan Korea Utara karena dipaksa oleh negara lain, maka keduanya mempunyai keinginan untuk melakukan normalisasi hubungan yang mewujudkan reunifikasi. Reunifikasi tentunya perlu adanya keterlibatan antara kedua belah pihak negara dengan masing-masing kebijakan yang dikeluarkan terkait rencana reunifikasi. Kebijakan pertama untuk memulai langkah reunifikasi datang dari Korea Selatan. Pada tanggal 4 Juli 1972, Presiden Park Chung Hee berusaha berdialog untuk menjembatani jurang pemisah ini dengan para pejabat senior Korea Utara.¹ Dialog tersebut menghasilkan Pernyataan Bersama Korea yang membahas tentang pentingnya usaha untuk memulihkan kembali homogenitas bangsa, terlepas dari sistem politik dan ideologi yang dianut masing-masing pihak, pembentukan reunifikasi dalam upaya damai, serta merdeka dari campur tangan asing.

Upaya pendekatan dengan Korea Utara juga dilakukan pada masa pemerintahan Kim Dae Jung di tahun 90-an. Pada saat itu, Korea Utara mulai tampak kesulitan dalam ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena kekurangan bahan pangan pokok semakin terasa. Sementara itu, Korea Selatan terus maju dan berkembang menjadi salah satu negara industri besar di Asia Timur serta ikut tergabung dalam berbagai aktivitas internasional. Melihat kondisi tersebut membuat Korea Selatan terdorong untuk mencoba mengadakan kontak dengan Korea Utara agar turut serta tergabung dalam masyarakat internasional dan menjadi lebih terbuka. Korea Selatan juga berusaha untuk memberikan bantuan besar termasuk bahan-bahan pokok dan obat-obatan untuk masyarakat Korea Utara sekaligus juga untuk melunakkan pemerintah.

Kim Dae Jung menetapkan Kebijakan Sinar Matahari (*Sunshine Policy*) yang dimaksudkan untuk terus mencoba “menyinari” Korea Utara dengan sinar matahari, karena Korea Utara merupakan negara dingin dan beku dengan para pemimpin maupun masyarakatnya yang memakai pakaian tebal, sehingga sinar matahari yang pada mulanya tidak berfungsi, lama-kelamaan akan menciptakan udara hangat yang akan membuat mereka melepas pakaian tebalnya.²

Menyangkut kebijakan Korea Selatan dan situasi yang dihadapinya, Korea Utara menggeser strateginya ke arah Korea Selatan dengan menyerukan 'persatuan nasional

¹ Oberdorfer, D. (1997). *The Two Koreas: A Contemporary History*. London: Little, Brown and Company.

² Mas'ood, M., & Yoon, Y. S. (2015). *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

secara besar' untuk kepentingan Semenanjung Korea. Sebenarnya Korea Utara khawatir akan terjadinya penyerapan yang bisa dilakukan oleh Korea Selatan yang didukung oleh Amerika. Namun, Korea Utara menyadari bahwa masalah ekonominya perlu segera diselesaikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya upaya mengambil keuntungan kebijakan Korea Selatan saat ini yang berpusat pada peningkatan hubungan dan kerjasama ekonomi.

Prestasi paling menonjol dari kebijakan Kim Dae Jung adalah sebuah kawasan industri di kota Kaesong, Korea Utara, atau lebih dikenal dengan *Kaesong Industrial Complex* (KIC). KIC sebagian besar dibiayai oleh Korea Selatan sebagai upaya meningkatkan kerja sama. Ini adalah salah satu poin penting dalam kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta sering dipandang sebagai indikator hubungan di antara keduanya. Dalam kawasan industri ini, perusahaan Korea Selatan diperbolehkan memanfaatkan tenaga kerja murah yang terdidik dan handal, sementara sebagai gantinya, Korea Utara memperoleh devisa.

Mencapai reunifikasi nampaknya telah menjadi salah satu tujuan nasional terpenting bagi presiden Korea Selatan. Presiden Park Geun Hye yang terpilih pada tahun 2013 tidak terkecuali. Untuk menciptakan reunifikasi, Presiden Park mengambil tiga prinsip: 1) Normalisasi hubungan antar-Korea melalui proses membangun kepercayaan, 2) Memulai skala kecil proyek penyatuan yang pada akhirnya akan menghasilkan integrasi lengkap kedua Korea, dan 3) Mengambil langkah-langkah praktis untuk mempersiapkan penyatuan dengan memperkuat kemampuan reunifikasi.

Presiden Park Geun Hye kembali menegaskan pada tanggal 6 Januari 2014 dalam Konferensi Pers Tahun Baru. Presiden Park mengumumkan bahwa membangun pondasi pada era reunifikasi adalah salah satu dari dua urusan negara. Presiden Park menyatakan bahwa persiapan harus segera dilakukan untuk melepaskan diri dari konfrontasi antar Korea, ancaman perang, ancaman nuklir, dan membuka era reunifikasi, serta kebijakan yang akan dipromosikan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara, memperkuat bantuan kemanusiaan bagi warga Korea Utara, dan memperluas pertukaran sipil. Korea Utara pun akan menyambut dengan hangat usulan-usulan dari Korea Selatan jika memang bisa diaplikasikan untuk memperbaiki hubungan kedua Korea.³

Pencapaian reunifikasi ternyata juga diinginkan oleh pimpinan Korea Utara, Kim Jong Un. Pada tanggal 1 Januari 2014, Kim Jong Un mengumumkan bahwa kemajuan

³ Park, Y. H. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference. Seoul.

baru dalam hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara harus terus dibuat demi mewujudkan reunifikasi Korea. Selain itu, Kim Jong Un juga mengatakan bahwa upaya menciptakan atmosfer yang bagus harus dilakukan untuk meningkatkan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu dengan tidak memulai konflik atau perkelahian satu sama lain dan selalu mengambil jalan maupun kesempatan yang ada untuk memperbaiki hubungan antar-Korea. Kim Jong Un juga menyampaikan pidatonya di awal tahun 2016 bahwa Korea Utara dan Korea Selatan akan secara aktif melakukan dialog dan peningkatan hubungan antar keduanya. Kedua Korea akan duduk dan mendiskusikan isu-isu bangsa, termasuk reunifikasi, dengan siapa saja yang benar-benar menginginkan rekonsiliasi, solidaritas, perdamaian dan reunifikasi.⁴

Namun, fakta yang terjadi selama periode kepemimpinan Park Geun Hye justru tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Realisasi kebijakan yang ada tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan di awal pemerintahan. Pada tahun 2015, ketegangan justru terjadi secara terus-menerus antar keduanya dan mengarah ke jurang konflik bersenjata. Lambat laun Korea Selatan mulai memperlihatkan pengerasan sikap yang mencolok terhadap Korea Utara. Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan Korea Selatan yang ingin memperkuat sanksinya sendiri dengan menargetkan individu dan perusahaan tertentu yang mendukung program nuklir Korea Utara. Korea Selatan mulai mengurangi bantuan-bantuan ekonomi untuk Korea Utara. Bantuan yang ada sudah tidak sebesar yang diberikan pada masa kebijakan sinar matahari. Bahkan Korea Selatan mengumumkan untuk menutup KIC pada tanggal 10 Februari 2016. Padahal KIC bisa dikatakan sebagai inti dari Kebijakan Sinar Matahari yang dikejar Korea Selatan pada akhir 1990an dan awal 2000an dan juga sebagai langkah bagus dalam memperbaiki hubungan Korea demi mewujudkan reunifikasi.⁵

II. PEMBAHASAN

A. Perspektif Korea Selatan dan Korea Utara terhadap Reunifikasi

Reunifikasi pada dasarnya mengacu pada negara atau kota yang terbagi menjadi dua atau beberapa bagian untuk waktu yang lama dan berupaya untuk

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

menyatu kembali.⁶ Sementara Reunifikasi Korea merupakan penyatuan negara Korea Selatan dan negara Korea Utara di bawah satu pemerintahan. Hal ini akan membawa kedua negara bersama-sama bersatu di Semenanjung Korea. Reunifikasi adalah proses panjang mengatasi ketidakpercayaan dan meningkatkan saling pengertian untuk tujuan menyelesaikan konflik secara damai.

a) *Perspektif Korea Selatan terhadap Reunifikasi*

Reunifikasi Korea secara damai merupakan tujuan strategis utama Korea Selatan yang mencerminkan aspirasi rakyat Korea untuk mengakhiri tragedi yang sedang berlangsung di kedua Korea.⁷ Korea yang bersatu kembali dengan damai di bawah naungan Seoul dirasa akan menghapus tantangan utama bagi perdamaian dan stabilitas di Asia Timur. Selain itu, reunifikasi secara damai menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai lingkungan regional yang lebih harmonis dan kooperatif. Negara-negara tetangga maupun masyarakat internasional juga tidak perlu khawatir dengan ancaman penggunaan senjata pemusnah massal, seperti halnya senjata nuklir dan teknologi rudal.

Korea yang bersatu di bawah kepemimpinan Seoul akan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan kebutuhan rakyatnya. Korea Selatan mencatat keberhasilannya dalam mengangkat warganya sendiri keluar dari kemiskinan dan dapat membangun dirinya sebagai pemimpin global dalam industri dan perdagangan. Selain itu, Korea Selatan juga dapat menciptakan sebuah negara dengan komitmen yang mendalam terhadap demokrasi dan hak asasi manusia serta menunjukkan potensi kepemimpinan Seoul untuk mengubah Korea yang akan bersatu kembali.

Argumen tentang kemanusiaan, hak asasi manusia, ekonomi, regional, dan non-proliferasi untuk reunifikasi Semenanjung Korea yang dipimpin oleh Seoul mendapat respon baik di Amerika Serikat dan masyarakat internasional pada umumnya yang sangat mendukung reunifikasi. Pengakuan Amerika bahwa proses yang dipimpin oleh Korea Selatan merupakan pilihan terbaik untuk reunifikasi tercermin dalam *U.S.-ROK "Joint Vision Statement,"* tahun 2009, yang mencakup

⁶ Collins. (1819). *Collins*. Diakses pada Maret 20, 2017, from collinsdictionary.com: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

⁷ Revere, E. (2014). Reunifying Korea: Challenges, Uncertainties, and an Agenda for US-ROK Cooperation. *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*, 191-218.

tujuan untuk mencapai reunifikasi secara damai atas prinsip-prinsip demokrasi bebas dan sebuah ekonomi pasar.⁸

Garis dasar reunifikasi bagi Korea Selatan dimulai secara bertahap, langkah demi langkah, dan mengutamakan perdamaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam mencapai reunifikasi. Salah satu tujuan utama kebijakan reunifikasi Korea Selatan adalah untuk mendorong perubahan dalam sistem Korea Utara. Perubahan seperti itu demi kebaikan reunifikasi jika dilaksanakan dengan cepat dan damai.

b) Perspektif Korea Utara terhadap Reunifikasi

Jika membicarakan tentang reunifikasi, Korea Utara memiliki dua persepsi yang tidak berubah sejak perpecahan di Semenanjung Korea. Persepsi pertama adalah mengenai pembagian Korea ini merupakan hasil dari kekuatan eksternal atau 'kekuatan imperialis'. Kedua adalah reunifikasi merupakan masalah untuk 'mewujudkan kemerdekaan bangsa di seluruh negeri. Oleh karena itu, untuk mencapai reunifikasi, Amerika Serikat harus dikecam karena Amerika terus melakukan campur tangan di Korea Selatan terutama terkait hubungan kedua Korea.

Korea Utara memiliki gagasan reunifikasinya sendiri yang pada dasarnya bertentangan dengan pendapat Korea Selatan dan pemerintahan Pyongyang sangat berkomitmen terhadap gagasannya. Bagi Pyongyang, reunifikasi akan dicapai dengan syarat-syaratnya, di mana Korea Utara yang akan memimpin dengan sistem politik dan sosial Korea Utara diberlakukan di Korea Selatan.⁹ Pendekatan Pyongyang terhadap reunifikasi didukung oleh ideologi yang kaku dan sistem otoriter militan. Niat Pyongyang untuk memaksakan sosialisme di Selatan juga didukung oleh sebuah kekuatan militer besar, yang sering digunakan oleh Korea Utara untuk melawan Korea Selatan.

Persepsi para pemimpin Korea Utara tentang situasi politik didasarkan pada trauma masa lalu karena telah dikepung oleh kaum imperialis sejak Perang Korea yang berakhir pada tahun 1953. Ancaman imperialis terbesar berasal dari AS di era Perang Dingin. Korea Utara berpendapat bahwa tidak ada tempat di bumi yang tidak terpengaruh oleh pengaruh jahat Amerika Serikat dan tidak ada negara yang

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. Hal. 196.

tidak merasakan ancaman agresi dari Amerika. Hal ini juga mengeaskan bahwa Amerika Serikat pernah mengancam Korea Utara dengan serangan militer dan mengganggu reunifikasi nasional.

Perubahan yang dimaksudkan menunjukkan dua skema penyatuan yang berbeda. Pertama adalah penyatuan oleh kekuatan militer belaka dan kedua adalah reunifikasi dengan meminta bantuan dari aktivis anti-pemerintah Korea Selatan dalam merevolusi bagian Selatan. Korea Utara juga mulai menerapkan taktik reunifikasi ganda, yaitu provokasi militer dan pengejaran strategi "front persatuan" menuju reunifikasi.

B. Kebijakan Korea Selatan Mengenai Reunifikasi pada Masa Pemerintahan Park Geun Hye

a) *Trust-Building Process*

Park Geun Hye mempresentasikan *Trust-Building Process* atau proses pengembangan kepercayaan di Semenanjung Korea. Alasannya untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Kim Dae Jung, kebijakan *Trust-Building Process* berusaha meningkatkan dan memperbaiki hubungan antar-Korea demi terciptanya reunifikasi.¹⁰ Kebijakan ini dipresentasikan dalam sebuah artikel *Foreign Affairs* sebagai "*trustpolitik*" yang meminta Korea Utara untuk mengadakan kesepakatan untuk menjamin suatu konsekuensi yang meyakinkan atas segala tindakan yang melanggar perdamaian. Strategi tersebut pada dasarnya meminta Korea Utara untuk menunjukkan dirinya dapat dipercaya di mata masyarakat internasional sebagai prasyarat penting untuk membangun hubungan positif.

Namun, pada tahun 2014, Park Geun Hye mulai mengambil kebijakan ini menuju arah yang berbeda dengan semakin menekan reunifikasi sebagai bagian utama dari kebijakan antar Korea-nya. Kebijakan ini justru beroperasi atas dasar timbal balik dan kekakuan prinsip, di mana kepercayaan justru tidak ada dan tidak didefinisikan secara jelas. Kerjasama Korea Utara-Selatan di bawah *trustpolitik* tidak bergantung pada landasan kepercayaan, tetapi sebaliknya

¹⁰ Park, Y. H. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference. Seoul.

dilandasi oleh hubungan yang bergantung pada keyakinan dan permintaan tindakan timbal balik atas harapan positif.¹¹

Hal ini dikarenakan Park Geun Hye ingin menciptakan integrasi antar Korea secara bertahap yang melibatkan kerjasama kemanusiaan, menciptakan kemakmuran bersama melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung penghidupan rakyat, dan akhirnya membentuk integrasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun, perluasan kerjasama antar-Korea untuk proyek-proyek ekonomi berskala besar dikondisikan pada denuklirisasi Korea Utara.¹² Dalam pidatonya di Dresden pada Maret 2014, Park Geun Hye juga berfokus untuk menyerukan peningkatan pertukaran antar Korea dan terus mengulangi tema reunifikasi. Media Korea Utara mengkritik penekanan pada reunifikasi ini dengan menafsirkannya sebagai asumsi akan keruntuhan Korea Utara dan menciptakan reunifikasi yang dilakukan oleh pimpinan Korea Selatan melalui penyerapan.

b) *Kaesong Industrial Complex (KIC)*

Kawasan Industri Kaesong adalah kawasan industri yang terletak di Korea Utara, tepat di seberang zona demiliterisasi Korea Selatan. Proyek ini diluncurkan pada tahun 2004 dan sebagian besar dibiayai oleh Korea Selatan untuk meningkatkan kerja sama. KIC adalah salah satu poin penting dari perjanjian damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan sering dipandang sebagai indikator hubungan di antara keduanya.¹³ Korea Selatan mengatakan tujuan KIC adalah untuk mengembangkan sebuah industri di mana perusahaan Korea Selatan dapat memproduksi produk mereka menggunakan tenaga kerja Korea Utara.

Namun, pada tanggal 10 Februari 2016, pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk sepenuhnya menutup KIC. Presiden Park Geun Hye mengaitkan penutupan tersebut dengan uji coba nuklir keempat Korea Utara yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2016 dan peluncuran satelit yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 7 Februari, yang menyatakan bahwa Pyongyang telah "memanfaatkan secara salah" pendapatan dari KIC untuk meningkatkan nuklir dan rudal jarak jauh.

¹¹ Kang, S. N. (2014). Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trustpolitik for Inter-Korean Relations. *Issues and Insights*.

¹² Snyder, S. (2016). South Korean Identity Under Park Geun-hye: Crosscurrents & Choppy Waters. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*, 104-112.

¹³ BBC. (2016, Februari 10). What is the Kaesong Industrial Complex? Retrieved Maret 22, 2018, from BBC News: <http://www.bbc.com/news/business-22011178>

Seorang pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa pembukaan kembali KIC bisa saja terjadi apabila Korea Utara dapat menghilangkan kekhawatiran tentang program nuklir dan misilnya. Sebagai tanggapan atas langkah tersebut, Komite Korea Utara untuk Reunifikasi Damai mengumumkan bahwa Korea Utara mengusir lebih dari 100 pekerja Korea Selatan yang tetap di KIC, membekukan semua aset di kawasan, memutuskan dua jalur militer antar Korea, dan memulihkan kontrol militer atas zona KIC. Korea Utara juga mengancam akan ada "konsekuensi" selanjutnya.¹⁴

Penutupan KIC tersebut bisa dikatakan sungguh disayangkan karena pendirian KIC pada masa pemerintahan Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung ini dimaksudkan agar Korea Selatan dan Korea Utara bisa memperbaiki hubungan dengan melakukan kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. KIC juga merupakan tonggak penting dan kemajuan yang besar dalam mewujudkan reunifikasi selama berlangsungnya kebijakan sinar matahari Kim Dae Jung (*Sunshine Policy*), terutama reunifikasi secara damai yang dimulai dari kerjasama. Selain memberikan harapan kerjasama yang baik, Kaesong juga berkembang menjadi faktor untuk mencegah terjadinya perang di Korea.

c) *Bantuan Korea Selatan ke Korea Utara*

Provokasi nuklir dan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara membuat pemerintah Korea Selatan menanggihkan sementara proyek pertukaran, kerjasama, maupun bantuan-bantuannya untuk menekan Korea Utara dalam denuklirisasi. Termasuk langkah untuk menutup total KIC dan menjatuhkan sanksi pada Korea Utara dalam kerjasama, baik dengan Korea Selatan itu sendiri atau dengan masyarakat internasional. Sejak itu, pemerintah telah memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menderita kerugian penutupan KIC. Penangguhan kerjasama dan bantuan yang dilakukan tentu berdampak pada hubungan kedua Korea. Hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perwujudan reunifikasi.

Pada tahun 2013, seorang pejabat kementerian senior Korea Utara yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa tidak ada bantuan nyata ke Korea Utara hingga Agustus karena semua hubungan telah diputus setelah uji

¹⁴ Manyin, M. E. (2016). The Shutdown of the Joint North/South Korean Kaesong Industrial Complex. CRS Insight.

coba nuklir ketiga Korea Utara pada bulan Februari. Jumlah bantuan dan jumlah orang yang terlibat dalam pertukaran jatuh karena ada kekosongan enam bulan.¹⁵

Bagaimanapun Korea Utara mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dengan membuat ancaman militer, termasuk uji coba nuklir keempatnya. Korea Selatan bersama komunitas internasional mengambil sanksi keras terhadap Utara, termasuk penghentian kerjasama dan pengurangan bantuan. Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa tidak ada perubahan posisi dari pemerintah Korea Selatan bahwa denuklirisasi Korea Utara harus menjadi prioritas utama dalam hal dialog dengan Korea Utara.

C. Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara Dilihat dari Politik Internasional

a) Amerika Serikat

Membicarakan persoalan reunifikasi, menjaga status quo di Semenanjung Korea tanpa adanya nuklir Korea Utara adalah pilihan terbaik AS untuk masa mendatang. Meskipun tidak ada kepentingan jangka pendek dan menengah dalam mempromosikan reunifikasi, dalam jangka panjang Amerika Serikat menginginkan Korea yang bersatu, stabil, dan demokratis, memertahankan ekonomi pasar bebas, mengintegrasikan Utara dan Selatan secara efektif, meninggalkan senjata pemusnah massal, dan secara permanen sejalan dengan AS.¹⁶ Namun, jika Tiongkok memilih untuk melakukan intervensi sepihak di Korea Utara, justru akan menghasilkan Korea yang cenderung condong ke Beijing. Waktu juga menguntungkan Tiongkok, semakin jauh ke masa depan reunifikasi terjadi, semakin kuat posisi Tiongkok. Sementara sebaliknya, kekuatan AS yang relatif di wilayah tersebut cenderung menurun seiring waktu.

Tantangan lain untuk reunifikasi adalah ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang semakin meningkat, terutama pada masa pemerintahan Park Geun Hye. Amerika Serikat berpikir untuk mengadopsi tindakan balasan yang lebih agresif, beberapa di antaranya dapat mengacaukan rezim Korea Utara.¹⁷ Amerika Serikat akan banyak memberikan dukungan dan berkontribusi pada proses

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Port, B. (2016). North Korean Collapse or Korean Reunification: The Importance of Preparation over Prediction. *Military Review*, 8-19.

¹⁷ Revere, E. J. (2015, Januari 20). Korean Reunification and U.S. Interests: Preparing for One Korea. Retrieved Maret 23, 2018, from Brookings: <https://www.brookings.edu/on-the-record/korean-reunification-and-u-s-interests-preparing-for-one-korea/>

rekonstruksi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi Korea ketika reunifikasi terjadi. Membongkar mesin militer Korea Utara dan menghapuskan senjata nuklirnya akan menjadi prioritas utama bagi AS. Selain itu, reunifikasi Korea membutuhkan penjamin keamanan. Di sini AS mulai memainkan perannya kembali, bahkan dengan kehadiran militer maupun persenjataannya dan membuat alasan baru untuk aliansinya dengan Korea.

b) Tiongkok

Mengenai proses reunifikasi Korea, Tiongkok menekankan bahwa kedua Korea harus disatukan melalui negosiasi damai yang bebas dari campur tangan kekuatan asing. Jadi, Tiongkok mendesak bahwa pendapat Korea Utara harus dihormati dengan baik. Tiongkok tidak menyambut Korea yang bersatu di bawah pengaruh AS.¹⁸ Secara historis, Tiongkok selalu memertahankan hubungan dengan Korea dan berharap bahwa reunifikasi Korea akan menjaga hubungan ekonomi dan diplomatiknya dengan Tiongkok bahkan setelah reunifikasi. Tiongkok khawatir tentang kemungkinan ancaman kedudukannya di kawasan itu setelah reunifikasi Korea. Prospek Korea yang bersatu dengan kemampuan nuklir dan kehadiran AS yang hegemonik di Korea menimbulkan kekhawatiran besar bagi kepemimpinan politik dan militer Tiongkok. Namun, jika Korea disatukan oleh Seoul, Tiongkok akan mencoba untuk menciptakan hubungan baik dengan Korea Selatan dan mengurangi pengaruh AS di semenanjung itu.

Bagi Tiongkok, Korea Utara berfungsi sebagai penyangga strategis melawan aliansi AS. Jika Korea Utara siap untuk condong ke Beijing maka akan diberikan imbalan dukungan ekonomi dan politik demi mencegah keruntuhan, mencegah perang yang dimulai Korea Utara, dan mencegah atau menghentikan ketidakstabilan Korea Utara yang dapat meningkat ke konflik yang lebih luas. Pemerintah Tiongkok berharap bahwa Korea Utara harus mulai membatasi perilaku berisiko dan membatasi tujuannya dalam pengembangan senjata nuklir. Prioritas utama Beijing tetap tidak berubah, yaitu mengharapkan Korea Utara agar lebih bisa diandalkan dan responsif yang nantinya akan lebih memerhatikan kepentingan Tiongkok serta dapat berkomunikasi secara lebih terbuka dengan para pemimpin di Tiongkok.

¹⁸ Ji, Y. S. (2001). *Conflicting Visions for Korean*. Fellow, Weatherhead Center for International Affairs.

c) *Jepang*

Jika melihat letak geografisnya, stabilitas Semenanjung Korea sangat penting untuk keamanan Jepang. Baik dalam jangkauan rudal balistik Korea Utara maupun reunifikasi dengan skenario perang yang menggabungkan aksi langsung melawan Jepang. Oleh karena itu, status quo di Korea dengan non-nuklir Korea Utara adalah hasil pilihan yang dicari. Dalam jangka panjang, Jepang tidak menginginkan reunifikasi Korea.¹⁹ Jika memang reunifikasi terwujud, Jepang menginginkan reunifikasi yang ramah ke Jepang dan AS, layak secara ekonomi, dan terbuka secara politik.²⁰

Di sisi lain, mengingat ketegangan yang parah dalam hubungan antara Jepang dan Korea Selatan, Korea sering menganggap bahwa Jepang tidak mendukung atau bahkan akan berusaha menghalangi reunifikasi. Alasannya bahwa Jepang tidak menginginkan pesaing ekonomi yang lebih kuat.²¹ Profesor Masao Okonogi dari Universitas Keio menulis bahwa tidak dapat disangkal bahwa banyak orang Jepang secara samar-samar mengkhawatirkan munculnya nasionalisme ekstrem di Korea yang bersatu dan nasionalisme yang diarahkan ke Jepang. Misalnya, jika konflik emosional terjadi antara Jepang dan Korea, kemungkinan Korea yang bersatu beralih ke Tiongkok untuk melawan Jepang, serta melakukan upaya menuju pembangunan militernya sendiri.²²

Baru-baru ini, pandangan orang Jepang terhadap reunifikasi Korea menjadi lebih positif karena perilaku Korea Utara yang semakin agresif dengan kemampuan nuklir dan rudal Pyongyang yang semakin meningkat, serta kesadaran bahwa Kim Jong Un sama berbahayanya.

III. KESIMPULAN

Mewujudkan reunifikasi secara damai menjadi tujuan utama para pemimpin Korea Selatan. Demi mewujudkannya sekaligus menghentikan ancaman nuklir Korea Utara, Park Geun Hye mulai membentuk kebijakan denuklirisasi dengan menghentikan kerjasama dan bantuan ekonomi ke Korea Utara. Dana yang diberikan selama ini justru

¹⁹ Ibid.

²⁰ Cha, V. D. (2000). Japan's Grand Strategy on The Korean Peninsula: Optimistic Realism. cambridge.org, 227-266.

²¹ Klingner, B. (2015). Allies Should Include Japan in Korean Unification Plans. The Heritage Foundation, 1-8.

²² Ji, Y. S, Op.cit., hlm. 30

dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk mengembangkan nuklir. Korea Selatan mulai mengambil langkah dengan menutup salah satu fondasi penting reunifikasi dan kerjasama dua Korea, yaitu Kawasan Industri Kaesong. Implementasi yang berbeda dari kebijakan awal Park Geun Hye mengenai *trustpolitik* maupun kebijakan yang telah dibentuk oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti KIC justru menjadi kemunduran reunifikasi. Isolasi bantuan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan pemutusan kerjasama dengan Korea Utara semakin merenggangkan jarak di antara keduanya.

Namun, proses reunifikasi Korea tidak hanya tergantung pada Korea itu sendiri, melainkan juga tergantung pada negara dengan kekuatan besar. Amerika Serikat memiliki hubungan erat dengan Korea Selatan sejak perjanjian bilateral di tahun 1953, di mana AS mulai mengirimkan pasukan dan membantu militer Korea Selatan. Di sisi lain, Tiongkok memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara sekaligus penyumbang dana terbesar melalui perdagangan yang membuat Korea Utara masih bisa terus mengembangkan nuklirnya. Keduanya turut campur tangan dalam reunifikasi demi mencapai kepentingan agar Korea berpihak sepenuhnya dengan salah satu di antara mereka. Namun, Jepang justru tidak menginginkan reunifikasi karena trauma masa lalu terkait penjajahan Jepang di Korea membuat Jepang khawatir apabila kedua Korea berbalik arah mengancamnya terutama membawa ancaman dalam persaingan ekonomi.

Kedua Korea harus mampu secara mandiri membangun Korea yang bersatu tanpa campur tangan kekuatan eksternal di masalah domestik mereka meskipun sangat sulit karena reunifikasi tidak hanya berpengaruh bagi kawasan di Semenanjung Korea tapi juga internasional.

Daftar Pustaka

- BBC. (2016, Februari 10). *What is the Kaesong Industrial Complex?* Retrieved Maret 22, 2018, from BBC News: <http://www.bbc.com/news/business-22011178>
- Cha, V. D. (2000). Japan's Grand Strategy on The Korean Peninsula: Optimistic Realism. *cambridge.org*, 227-266.
- Collins. (1819). *Collins*. Dipetik Maret 20, 2017, dari collinsdictionary.com:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>
- Ji, Y. S. (2001). Conflicting Visions for Korean. *Fellow, Weatherhead Center for International Affairs*.
- Kang, S. N. (2014). Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trustpolitik for Inter-Korean Relations. *Issues and Insights*.
- Klingner, B. (2015). Allies Should Include Japan in Korean Unification Plans. *The Heritage Foundation*, 1-8.
- Manyin, M. E. (2016). The Shutdown of the Joint North/South Korean Kaesong Industrial Complex. *CRS Insight*.
- Mas'ood, M., & Yoon, Y. S. (2015). *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oberdorfer, D. (1997). *The Two Koreas: A Contemporary History*. London: Little, Brown and Company.
- Park, Y. H. (2014). South and North Korea's Views on the Unification of the Korean Peninsula and Inter-Korean Relations. *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*. Seoul.
- Port, B. (2016). North Korean Collapse or Korean Reunification: The Importance of Preparation over Prediction. *Military Review*, 8-19.
- Revere, E. (2014). Reunifying Korea: Challenges, Uncertainties, and an Agenda for US-ROK Cooperation. *The 2nd KRIS-Brookings Joint Conference*, 191-218.
- Revere, E. J. (2015, Januari 20). *Korean Reunification and U.S. Interests: Preparing for One Korea*. Retrieved Maret 23, 2018, from Brookings: <https://www.brookings.edu/on-the-record/korean-reunification-and-u-s-interests-preparing-for-one-korea/>
- Snyder, S. (2016). South Korean Identity Under Park Geun-hye: Crosscurrents & Choppy Waters. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*, 104-112.